

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI

Budhy Prianto

BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Venezia Indra Ghassani
Praptining Sukowati

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rijal Ramdani

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA; Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Khoiron

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)

Wydha Mustika Maharani
Sukardi

DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG

Sri Hartini Jatmikowati
Titot Edy Suroso

MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA

Catur Wahyudi

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

<i>Budhy Prianto</i>	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	105-117
<i>Rijal Ramdani</i>	Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	118-131
<i>Wydha Mustika Maharani Sukardi</i>	Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)	132-152
<i>Catur Wahyudi</i>	Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya	153-169
<i>Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati</i>	Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial	170-182
<i>Khoiron</i>	Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	183-195
<i>Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso</i>	Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang	196-211

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)

Wydha Mustika Maharani ¹
Sukardi ²

¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik – Universitas Merdeka Malang

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang

Email: wydhamustika7@gmail.com

Abstract

This research was done relation with the emergency of the problem about effort for poverty reduction undertaken by governments who often considered lacking et maximal, because had a negative impact which make work lazy cultural and drape their life on the aid given by the government. The relation to that, so government of Blitar City has set a way to solve these problems by apply stub "Policy Free Education for The Civil Society at Blitar City through Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun". This research carrying to answer over (1) How is the implementation of program rintisan wajib belajar 12 tahun" at Blitar City, (2) How is the performance implementation, and (3) What is the dynamics that appear in the process of the implementation. This research used mixed methods approach with the use model of concurrent triangulation. The data collection techniques by interviews, observation, documentation and questionnaire. Based on the research results can be obtained that in the program implementation have been good enough, that was reviewed of some aspect: initiation taken by the mayor to development human resources through program rintisan wajib belajar 12 tahun". Support a sufficient budget resources. The results of the implementation of seen from scoring output indicators are program of them: free education reached all students at public schools and private schools. Free education considered beneficial for less well of students and not influential for capable students. The support factor: implementing officials who prioritize education above other sectors. While factors that hampers: the weakness regulation "Program Wajib Belajar 12 Tahun" resulting tug diversion of authority to manage a high school education, the lack of role from parents in terms of children education, the lack of socialization from sides of school about free schooling program.

Key Word: Policy Implementation, social deprivation and poverty, decentralization of education

Intisari

Penelitian ini dilakukan terkait dengan munculnya permasalahan mengenai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah yang sering kali dinilai kurang mendapatkan hasil yang maksimal, karena menimbulkan dampak negatif yaitu menciptakan budaya malas bekerja serta menggantungkan hidupnya pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Penelitian ini mencoba menjawab atas (1) bagaimana implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar; (2) bagaimana kinerja implementasinya; (3) apa saja dinamika yang muncul dalam proses implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan menggunakan model concurrent triangulation. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa di dalam implementasi program sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut ditinjau dari beberapa aspek diantaranya: Adanya inisiasi yang diambil oleh Walikota untuk mengembangkan sumberdaya manusia melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dukungan sumberdaya anggaran yang memadai. Hasil implementasi dilihat dari penilaian indikator keluaran program diantaranya: pendidikan gratis sudah menjangkau seluruh pelajar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; pendidikan gratis dinilai bermanfaat bagi siswa kurang mampu dan tidak begitu berpengaruh bagi siswa mampu. Faktor pendukung: adanya komitmen pejabat pelaksana yang lebih memprioritaskan pendidikan di atas sektor yang lain. Sedangkan faktor penghambat: lemahnya regulasi wajib belajar 12 tahun mengakibatkan tarik ulur pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah, kurangnya peran serta orang tua dalam hal pendidikan anak, Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait program pendidikan gratis.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, deprivasi sosial dan kemiskinan, desentralisasi pendidikan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Indonesia pada tahun 2014 berpenduduk sekitar 252 juta jiwa, jumlah penduduk miskin sebesar 27,73 juta jiwa dan pada tahun 2015 mencapai 28,59 juta jiwa (BPS, 2016). Dari total tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Masalah kemiskinan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena telah banyak menjerumuskan masyarakat lapisan bawah kedalam jurang kemiskinan sehingga pemerintah perlu melakukan upaya terus menerus untuk memerangi/memecahkan masalah penduduk yang terbelenggu oleh jurang kemiskinan.

Indonesia ikut berkomitmen dalam agenda pembangunan global pada kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang sering disebut *Sustainable Development Goals*. Mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dijalankan. SDGs memiliki 17 target yang mana target pertama adalah menghapus kemiskinan. Untuk dapat mencapai target tersebut pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu bekerja keras dan berkomitmen untuk memerangi kemiskinan.

Upaya penanganan kemiskinan sering dilakukan oleh pemerintah, baik dengan strategi langsung maupun tidak langsung. Strategi langsung yang dilakukan pemerintah dapat berupa pemberian bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, pemberian beras miskin dan pemberian bantuan dana sebagai modal usaha mikro kecil menengah. Sedangkan strategi tidak langsung melalui penyediaan sarana dan

prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan perlindungan sosial.

Strategi langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sering kali dinilai kurang mendapatkan hasil yang maksimal karena menimbulkan dampak negatif yaitu menciptakan budaya malas bekerja karena hidupnya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Belum lagi jika bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran, warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak menerima sedangkan warga yang tegolong mampu malah menerima bantuan. Bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut dapat mengakibatkan pemborosan dalam anggaran dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

Upaya pengentasan kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin tanpa mengambil sasaran secara utuh. Misalnya saja keluarga yang mempunyai anak yang kebanyakan tidak bersekolah. Warga miskin yang memiliki anak yang tidak sekolah tersebut biasanya disebabkan oleh himpitan ekonomi (tuntutan kebutuhan keluarga) dan bisa muncul dari keluarga kurang harmonis (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian khususnya dalam hal pendidikan. Yang lebih parah adalah indikasi pemaksaan orang tua terhadap anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga lebih memilih berhenti bersekolah.

Potret seperti itu sering dijumpai di Indonesia umumnya di kota-kota besar atau diperkotaan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan juga perlu diarahkan pada keluarga miskin yang

memiliki anak yang masih membutuhkan pendidikan baik pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA/setara. Anak keluarga miskin yang memerlukan pendidikan tersebut perlu dibantu pemberdayaannya melalui pendidikan yang cukup sehingga dapat menanggulangi bertambahnya keluarga miskin baru. Pendidikan dapat menjadi investasi untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik dan menjangkau semua kalangan maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.

Selain itu pentingnya pendidikan juga terdapat di UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penduduk kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sehubungan dengan berbagai permasalahan kemiskinan yang telah dijabarkan di atas serta tidak optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kota Blitar mencanankan pendidikan gratis bagi masyarakat Kota Blitar melalui program rintisan wajib belajar 12 tahun.

Walaupun luas Kota Blitar dan pendapatan daerah tidak sebesar DKI Jakarta, namun dari sisi program yang digagas, tidak mau kalah dengan DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar, di Kota Blitar pun melakukan hal yang

sama yakni dengan mencanankan program rintisan wajib belajar 12 tahun” pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA/setara bagi seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Program tersebut digagas oleh Walikota Blitar tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota Blitar No. 8 Tahun 2015 dan sudah diimplementasikan sejak tahun 2011 sehingga program tersebut sudah berjalan hampir 6 tahun.

Program rintisan wajib belajar 12 tahun ini dilaksanakan bukan semata karena adanya masalah pendidikan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar sebelumnya, namun program ini salah satu wujud dari janji kampanye Calon Walikota Blitar yang terpilih periode 2011-2015. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul “Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun”. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No. 8 Tahun 2015”, guna melihat sejauh mana implementasi program tersebut berjalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

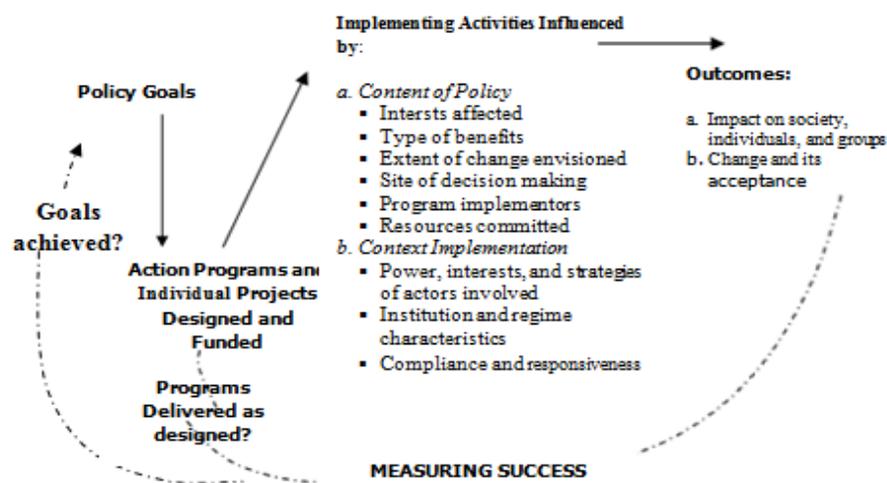
Istilah kebijakan (*policy*) menurut Thomas R. Dye (1998:2): “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do.* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Menurutnya, kebijakan tidak harus dilakukan tetapi juga ada hal-hal yang sengaja tidak dilakukan, karena sama-sama mempunyai pengaruh terhadap publik. Sedangkan istilah publik (*public*) adalah berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh

pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Parson, 2006:3). Sehingga kebijakan publik dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah yang mana memiliki tujuan tertentu demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Pentingnya kebijakan untuk diimplementasikan adalah agar mempunyai dampak atau tujuan seperti yang diinginkan. Dalam pengertian luas implementasi kebijakan dipandang sebagai: alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih kebijakan atau tujuan yang diinginkan (Sadhana, 2011:169).

Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Agustino, 2008:154). Grindle menyatakan: *“The content of various policies also dictates the site of implementation. The content of public programs and policies is an important factor in determining the outcome of implementation initiative. Policy or program content is often a critical factor because of the real or potential impact it may have on given social, political, and economic setting. Therefore, it is necessary to consider the context or environment in which administrative action pursued.”*

Gambar 1
Implementasi Kebijakan menurut Grindle



Sumber: Grindle, 1980

Indikator Kinerja Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley (1985), agar dapat memahami realitas implementasi dengan baik maka perlu dilihat secara detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui oleh implementator

dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Sulistyastuti, 2012:72). Lebih lanjut, Sulistyastuti (2012:100) menjelaskan bahwa untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan, maka penilaian kinerja merupakan sesuatu yang penting. Dalam

penilaian keluaran program yang dijadikan aspek frekuensi, *bias* (menyimpang), *service delivery*, penilaian meliputi akses, cakupan (*coverage*), dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

Tabel 1
Indikator Keluaran (*output*) Kinerja Kebijakan

Indikator Kinerja	Penjelasan
Akses	Untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.
Cakupan (<i>coverage</i>)	Untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan layanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) dengan menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dan membuat proporsi jumlah sasaran yang sudah mendapatkan layanan terhadap total kelompok target.
Frekuensi	Seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan/ program.
Bias	Untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran program.
Ketepatan layanan	Untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Hal ini penting, jika keterlambatan dalam implementasi tersebut akan membawa implikasi kegagalan dalam mencapai tujuan.
Akuntabilitas	Untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
Kesesuaian program dengan kebutuhan target sasaran	Untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Sumber: Sulistyastuti, 2012: 105-110

Deprivasi Sosial dan Kemiskinan Terhadap Pendidikan

Sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang tepat dan sempurna untuk mengatasi masalah kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan terus menerus perlu dikembangkan. Tahun 1981 Amartya Kumar Sen mulai terkenal di bidang ekonomi politik dalam tulisannya yang berjudul *“Poverty and Famine: An essay on Entitlement and Deprivation”*. Menurut Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam tetapi juga dapat disebabkan oleh kediktatoran dalam sistem politik dalam suatu negara.

Sementara itu Sen dalam karyanya yang berjudul *Development As Freedom* (1999) menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan *freedom of choice*. Sen dalam Yulius Slamet menyebutkan bahwa: “Orang miskin sama sekali tidak memiliki kebebasan berpendapat karena terjadi *capability deprivation*”. *Capability deprivation* yang dimaksud oleh Sen diantaranya: “*Structural deprivation* (posisi orang miskin selalu dalam posisi yang lemah); *Social capability deprivation* (orang miskin tidak dapat meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan partisipasi dalam organisasi); *Economic capability deprivation* (orang miskin tidak dapat

mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi seperti perbankan, tetapi mereka terjebak pada rentenir yang tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit); *Technological capability deprivation* (orang miskin tidak dapat memiliki teknologi baru yang memerlukan modal yang cukup besar); *Political capability deprivation* (orang miskin tidak mampu memengaruhi keputusan politik yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak didengarkan aspirasinya, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *collective action*); *Psychological deprivation* (orang miskin selalu memperoleh stigma sebagai orang-orang yang kolot, bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma inilah yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelkan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik)”

Oleh karena itu, melalui program pendidikan gratis diharapkan dapat meningkatkan kompetensi bagi masyarakat Kota Blitar sekaligus sebagai upaya penataan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.

Desentralisasi Pendidikan

Baik dan buruknya pendidikan untuk masyarakat berada di tangan pemerintah selaku penyelenggaraan pendidikan. Peran pemerintah untuk menjalankan pendidikan yang baik, layak, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat baik kalangan atas maupun bawah menjadi strategis yang penting untuk diupayakan. Menurut Jalal (2001:125) desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusannya sendiri dalam

mengatasi permasalahan yang dihadapinya dibidang pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan pendidikan untuk masyarakat di daerahnya sendiri. Dengan mekanisme penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pelayanan pendidikan diharapkan lebih efisien dan efektif karena daerah tidak tergantung dan menunggu kebijakan pusat untuk keperluan daerahnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dianggap cocok dalam penelitian ini ialah metode kombinasi atau sering dikenal dengan *mixed methods*. Dengan menggabungkan dua bentuk metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, hal tersebut bertujuan untuk melengkapi kekurangan disalah satu metode tersebut. Model yang dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *concurrent triangulation*. Alasan pemilihan model tersebut adalah diperlukan menyempurnakan dari satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain agar diperoleh data yang lebih lengkap, valid, dan objektif.

Lokasi yang dipilih adalah Kota Blitar. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kota Blitar adalah salah satu daerah yang melaksanakan pendidikan gratis melalui program rintisan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran sektor pendidikan terbesar se-Indonesia. Sedangkan peneliti

menggunakan siswa-siswi SD, SMP, dan SMA negeri dan swasta sebagai sumber data/sampel.

Di bawah ini peneliti jabarkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan:

Tabel 2
Pengumpulan Data dan Sumber Data

Fokus Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun: a. Inisiasi b. Dasar Hukum c. Organisasi Pelaksana d. Sumber Anggaran e. Mekanisme Pelaksanaan f. Akuntabilitas Pelaksanaan	Wawancara, Studi Dokumentasi	Walikota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar
Kinerja Implementasi Program: a. Akses b. Cakupan c. Ketepatan Layanan d. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan	Angket/Kuesioner, Observasi, Wawancara	Dinas Pendidikan, Guru, Siswa
Dinamika Proses Implementasi Program: a. Faktor Pendukung b. Faktor penghambat	Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi	Walikota Blitar, Dinas Pendidikan, Guru, Komite Sekolah,

Sumber: Data diolah peneliti

IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Inisiasi

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin selalu sarat akan kepentingan. Namun masalahnya ada atau tidaknya kepentingan, serta kepentingan apa dan siapa yang hendak dicapai. Kepentingan pribadi dan sekutu-sekutunya untuk pertahankan dan perkuat kekuasaan elit, ataukah kepentingan orang banyak.

Grindle juga beranggapan bahwa sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan (*Interest affected*), baik kepentingan institusi maupun pelaksana kebijakan dan sasaran dari isi kebijakan. Untuk itu, kepentingan berbagai

pihak yang terangkum dalam isi kebijakan sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan dampak yang ditimbulkan. Sebuah kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika tujuan dari kebijakan tersebut memiliki dampak bagi individu maupun kelompok kepentingan di mana kebijakan tersebut berlaku. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan programnya.

Begitu pula konsep pendidikan gratis yang dicetuskan oleh Walikota Blitar yang mana ide dan gagasan tersebut muncul dari pengalaman hidup pribadinya. Dari pemikiran dan kehidupan di masa sulit itulah muncul keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya ada hal yang perlu dilakukan, ada visi dan program

yang harus diperjuangkan. Sebelum terpilih sebagai Walikota Blitar beliau menjadi anggota DPRD. Isu pendidikan gratis yang cukup populis ini berhasil memenangkan dirinya saat pencalonan sebagai Walikota Blitar yang dituangkan dalam visi misi kampanyenya.

Kemudian, dari sisi *stakeholder, site of decision making* dapat dilihat sejauhmana *stakeholder* bersangkutan diberi wewenang untuk mengubah kebijakan, baik secara substantif maupun teknis. Menurut Jenkins (1967) dalam Parsons (2005:81), mengemukakan siklus kebijakan publik salah satunya adalah inisiasi. Awalnya inisiasi ini sempat menuai kritikan dari beberapa kalangan yang menganggap bahwa program pendidikan gratis ini mustahil jika diwujudkan karena menyangkut sasaran yang luas yakni bukan hanya ditujukan bagi kalangan/siswa yang kurang mampu saja namun seluruh pelajar Kota Blitar. Sedangkan APBD Kota Blitar yang terbilang kecil, dengan alokasi 20% anggaran untuk bidang pendidikan dikhawatirkan juga akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang lain. Namun kekhawatiran itu tidak terlalu dipedulikan oleh Walikota Blitar. Walikota Blitar tersebut ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu.

Menurut Grindel (1980:10) jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of Benefit*) oleh kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan atau program yang dirancang untuk mencapai manfaat dalam jangka panjang mungkin lebih sulit untuk diterapkan daripada kebijakan yang akan memberikan manfaat dengan segera. Pada konteks ini rumusan tujuan kebijakan yang

memiliki kegunaan segera atau memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat sebagai sasaran kebijakan akan lebih mendapatkan dukungan untuk terlaksana dengan baik. Secara umum program rintisan wajib belajar 12 tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau demi terwujudnya rintisan wajib belajar 12 tahun sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi diri agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Secara khusus program rintisan wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk:

- a. Menggratiskan biaya operasi non personalia sekolah, dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPBL, SMA/MA, SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
- b. Meningkatkan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Sasaran program rintisan wajib belajar 12 tahun adalah siswa yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPBL, SMA/MA, SMALB, dan SMK baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada satuan pendidikan sebagai biaya operasional sekolah, pengadaan buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat), dan biaya praktek.

Perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*) merupakan dimensi selanjutnya dari isi kebijakan. Tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan akan mempengaruhi terhadap perbedaan dalam tingkat perilaku. Program tertentu memerlukan adaptasi yang lama untuk diterima dan menimbulkan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam isi kebijakan. Sementara itu ada pula program yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak penerima kebijakan. Walikota Blitar punya alasan bahwa biarpun Kota Blitar adalah kota kecil, PAD nya kecil, APBD Kecil, tetapi anak sekolah harus gratis. Walikota Blitar berharap warga Kota Blitar setidaknya lulusan minimal SLTA. Beliau merencanakan pada suatu ketika nanti, sekolah sampai sarjana di Blitar gratis dan harapan tersebut tahun 2016 sudah terealisasi.

Keberhasilan mewujudkan pendidikan gratis tentunya juga diikuti oleh keberhasilan lainnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Blitar berada pada urutan tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Amartya Sen (pengusung konsep perkembangan sebagai pembangunan manusia). Perkembangan bukan hanya tentang ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan indikator lainnya. Perkembangan berarti membebaskan manusia dari ketidak mampuan atau ketidakkompetennya. Sehingga diharapkan melalui pendidikan gratis tersebut masyarakat Kota Blitar dapat berkembang dan sebagai bentuk investasi jangka panjang (*long term investation*) untuk mewujudkan pembangunan bangsa.

Pendidikan memberikan peluang untuk mentransformasikan nilai-nilai pendidikan supaya penyelenggaraan pendidikan mampu menjadi *problem solver* terhadap problematika masyarakat (Yamin, 2013:192).

Dasar Hukum

Lazimnya dalam setiap kebijakan dilahirkan oleh aktor penyelenggara publik tidak lepas dari landasan hukum sebagai dasar fundamental untuk merumuskan sebuah kebijakan dan tertibnya pada tataran implementasi sebuah kebijakan. Peraturan Pemerintah yang melandasi terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Walikota Blitar No. 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- e. Peraturan Walikota Blitar No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- f. Peraturan Walikota Blitar No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Sumber Anggaran

Grindle (1980:57) menyatakan bahwa apa yang sering disebut sebagai *implementation failures* program-program pembangunan pada kenyataannya seringkali disebabkan karena faktor kelangkaan sumber daya. Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa sumber daya (*resources*) merupakan faktor yang sangat penting dan dapat berpengaruh langsung dalam implementasi kebijakan. Suatu kebijakan, walaupun telah dirumuskan secara baik, jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang cukup akan sulit untuk diimplementasikan. Anggaran pendidikan menjadi anggaran prioritas utama bagi Pemerintah Kota Blitar. Bahkan selalu menempati peringkat pertama dalam persentase anggaran APBD Kota Blitar.

Peluang keberhasilan ditentukan manakala telah tersediannya anggaran atau biaya yang benar-benar cukup untuk menjalankannya. Hal ini merupakan indikator kongkrit pendidikan benar-benar menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Bahkan dari tahun ke tahun anggaran Kota Blitar untuk bidang pendidikan menunjukkan trend yang meningkat. Inilah realisasi nyata kebijakan APBD Pro Rakyat atau dalam istilah akademis biasa disebut "*Pro-Poor Budgeting*".

Organisasi Pelaksana

Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan. Menurut Dennis H. Wrong yang dikutip oleh Santosa (2009:10) mengungkapkan bahwa setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural

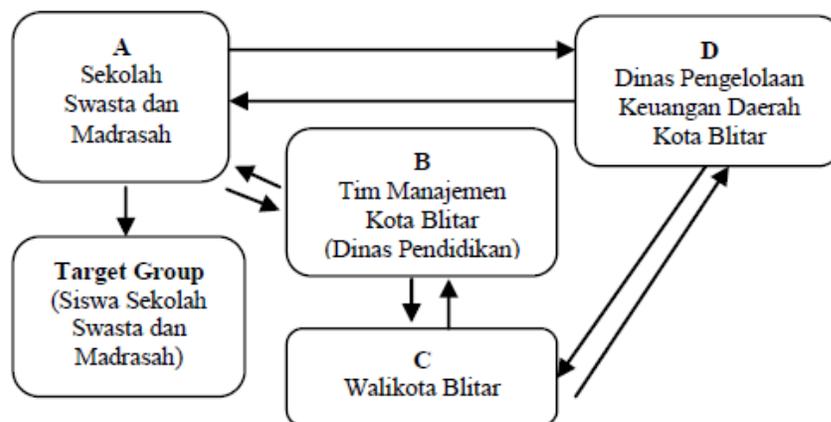
utama sebagai berikut: Pertama, pembagian tugas; kedua, hierarki otorita; ketiga, peraturan dan ketentuan terperinci; keempat, hubungan impersonal diantara pekerja. Dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar, organisasi yang terlibat adalah Dinas pendidikan, sekolah, UPTD pendidikan perkecamatan (sananjawan, sukorejo, kepanjen kidul) UPTD madrasah dan lembaga yang ada di Kota Blitar: untuk urusan pembuatan peraturan maka Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak bagian hukum. Sedangkan dalam hal perencanaan anggaran pendidikan Dinas Pendidikan Kota Blitar berkoordinasi dengan BPKAD. Jadi penyelenggaraan program pendidikan gratis di Kota Blitar terbentuk dari beberapa jaringan *leading sector*.

Mekanisme Pelaksanaan

Proses implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar menggunakan mekanisme kerja (koordinasi) yang bersifat *reciprocal* terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi menghasilkan keluaran (*output*) yang akan menjadi masukan (*input*) bagi organisasi yang lain, namun pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika *input* yang telah diproses tersebut akan menghasilkan keluaran yang akan digunakan sebagai *input* bagi organisasi yang sebelumnya memberikan *input* (Sulistiyastuti, 2015:158). Logika kerja tersebut dapat digambarkan oleh peneliti dengan mengambil contoh yaitu program pendidikan gratis

di sekolah swasta/madrasah Kota Blitar melalui diagram alir sebagai berikut:

Gambar 2
Mekanisme Kerja program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar



Sumber: Diolah oleh peneliti

Proses implementasi yang menggunakan mekanisme kerja (koordinasi) yang bersifat *reciprocal* ini ditemukan pada saat implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun yang melibatkan Sekolah Swasta dan Madrasah (A), Dinas Pendidikan sebagai Tim Manajemen Kota Blitar (B), Walikota Blitar (C), dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar (D). Tugas masing-masing organisasi adalah sebagai berikut: Kepala Sekolah Swasta dan Madrasah (A) membuat proposal permohonan dana rintisan wajib belajar 12 tahun sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar (B). Selanjutnya Tim Manajemen Kota Blitar (B) mengusulkan alokasi dana untuk ditetapkan oleh Walikota Blitar (C) yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota Blitar. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (D) mentransfer dana program rintisan wajib belajar 12 tahun ke Sekolah Swasta dan Madrasah (A). Selanjutnya Sekolah Swasta

dan Madrasah (A) membelanjakan dana yang diterimanya dan menyalurkan ke Target Group (siswa) serta melakukan penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana ke Tim Manajemen Kota Blitar (B) yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) serta tanda bukti pengeluaran yang sah. Selanjutnya Tim Manajemen Kota Blitar (B) melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar (C).

Akuntabilitas pelaksanaan

Menurut Mardiasmo (2002:20) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban berupa penyajian laporan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik berarti pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar menurut Kabag Perencanaan dan Evaluasi Program bahwa format pelaporannya kadang setiap tahun peraturannya sering berubah-ubah. Sehingga yang menjadi kesulitan dalam hal pelaporan. Laporan tersebut ditujukan untuk audit BPK dan BPKP, namun semua sudah menjadi aturan, sehingga mau tidak mau harus dipenuhi agar sesuai dengan aturan dan prosedurnya.

apakah program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan/program mudah dihubungi/ditemui oleh masyarakat selaku kelompok sasaran kebijakan/program apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Menurut pengakuan Kabag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Blitar bahwa fasilitas gratis sudah menjangkau seluruh pelajar yang ada di Kota Blitar dan sudah mencover semua siswa-siswi pelajar yang berdomisili di Kota Blitar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Fasilitas yang didapat oleh siswa diantaranya adalah sebagai berikut:

KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Akses

Menurut Sulistyastuti (2015:106) bahwa indikator akses digunakan untuk mengetahui

Tabel 4
Daftar Fasilitas Sekolah Siswa

Fasilitas yang sudah diterima	Fasilitas yang akan diterima Tahun 2017
1) Kain seragam + ongkos jahit	1) Uang Saku
2) Bed sekolah	2) Sepeda
3) Tas	3) Seragam untuk anak luar kota (kabupaten)
4) Sepatu	
5) Kaos Kaki	
6) Ikat pinggang	
7) Topi	
8) Dasi	
9) Buku Tulis	
10) Kotak Pensil dan seisinya	
11) LKS	
12) Tablet	
13) Transportasi bus sekolah	

Sumber: Diolah oleh penulis

Cakupan

Di dalam bukunya Sulistyastuti yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (2015:107) bawasannya indikator cakupan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau atau mendapatkan pelayanan atau hibah oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Menurut Kabag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Blitar pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun sudah mencakup seluruh siswa-siswa baik sekolah negeri maupun swasta yang berdomisili di Kota Blitar.

Berikut jumlah siswa yang berdomisili di Kota Blitar yang menjadi target sasaran program pendidikan gratis.

Tabel 3
Jumlah Siswa Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Domisili Siswa Kota Blitar	Domisili Siswa Luar Kota Blitar
SD	9.762	2.207
SMP	5.628	2.667
SMA	4.361	2.460
Jumlah	19.751	7.334

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Ketepatan Layanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki *sensitivitas* terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut (Sulistyastuti, 2015:108).

Terkait dengan indikator ketepatan layanan, peneliti melakukan survei terhadap 30 responden dari siswa-siswi pelajar SD, SMP, SMA yang berasal dari dalam Kota Blitar, Peneliti memberikan pertanyaan bahwa apakah fasilitas gratis diterima tepat pada waktunya? Dari 30 responden tersebut 67% siswa menjawab "Tidak". Molornya pendistribusian fasilitas gratis tersebut dinilai oleh pihak sekolah karena disebabkan karena terhambat oleh anggaran yang belum cair dan Dinas Pendidikan memberikan alasan tergantung terbitnya surat pertanggungjawaban. Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor ketepatan layanan dapat menjadi penghambat bagi kelangsungan program pendidikan gratis, di mana fasilitas gratis seharusnya diterima tepat pada saat siswa mulai masuk ke sekolah yaitu awal Juli namun pendistribusia seragam molor hingga bulan Agustus. Sehingga bagi siswa yang tidak sabar menunggu pembagian seragam akhirnya membeli seragam di luar.

Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak (Sulistyastuti, 2015:110). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelajar Kota Blitar bahwa program pendidikan gratis ini dinilai sudah cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan, namun siswa kadang merasa kurang puas hal tersebut ditunjukkan dengan perasaan/sikap yang masih mengeluhkan bahwa gadget berupa tablet untuk menunjang pembelajaran kualitasnya kurang bagus dan cepat mengalami kerusakan,

dan juga sepatu yang diterima ada yang kekecilan sehingga fasilitas tersebut tidak digunakan.

Faktor lain juga semakin maraknya siswa yang berpenampilan ala keartisan sehingga mereka merasa malu (gengsi) jika memakai atribut sekolah yang berlogo “Pro Rakyat” seperti tas, sepatu, dan buku. Sehingga dapat peneliti

simpulkan bahwa program pendidikan gratis ini dinilai bermanfaat bagi siswa kurang mampu dan tidak begitu berpengaruh bagi siswa mampu.

Kesesuaian program pendidikan gratis terhadap kebutuhan pelajar Kota Blitar dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Pendidikan Gratis

Indikator Capaian Kinerja	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Angka Partisipasi Murni (APM)			
a. SD	90,15%	95,91%	95,89%
b. SMP	82,87%	88,13%	90,31%
c. SMA	74,69%	73,15%	80,22%
Angka Putus Sekolah (ApuS)			
a. SD	0,00%	0,02%	0,00%
b. SMP	0,00%	0,00%	0,00%
c. SMA	0,77%	0,002%	0,02%
Angka Melek Huruf	97,33%	97,98%	98,95%
Guru	88,78%	95,27%	97,54%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

DINAMIKA PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Faktor pendukung

Komitmen dan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana

Faktor terciptanya sebuah kebijakan agar berhasil selalu ada dua hal, kemauan dan kemampuan. Keduanya sangat berhubungan (berkaitan erat). Sebab niat atau kemauan besar akan menghasilkan kemampuan besar. Hal ini kaitannya dengan kemauan para pengambil kebijakan, terutama pimpinan puncak (*top manajemen*) suatu pemerintahan. Komitmen terdiri dari yang pertama adalah arah dan rangkaian tujuan-tujuan dalam skala prioritas pejabat dan

yang kedua adalah kemampuan pejabat dalam mewujudkan prioritas tersebut.

Walikota Blitar menjadi tokoh kunci bagi terciptanya pendidikan gratis. Bagaimana kemauan dan niat itu muncul hingga beliau memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi misi pendidikan gratis di kotanya. Ini adalah *‘political will’* (kemauan politik), di mana pilihan politik untuk mewujudkan pendidikan gratis menjadi garis kebijakan tokoh, politisi, atau bisa juga dari garis organisasi atau partai politik politisi tersebut

Setelah berjalan beberapa tahun, pendidikan gratis terus disempurnakan. Setiap tahun dilakukan proses evaluasi. Aspek yang dirasakan kurang baik terus disempurnakan.

Walikota Blitar juga sering memberikan arahan agar pendidikan yang menguras banyak anggaran APBD Kota itu berbanding lurus dengan niat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk arahan Walikota Blitar adalah pentingnya pendidikan mengarahkan capaian kinerjanya pada pendidikan karakter dan terwujudnya ekonomi kreatif.

Dukungan Sumberdaya Anggaran

Edward III mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya anggaran yang diperlukan guna membiayai operasionalitas pada pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana bertanggungjawab terhadap suatu kebijakan untuk diimplementasikan akan tetapi tidak didukung oleh sumberdaya

finansial maka pelaksanaan program/kebijakan tersebut tidak akan efektif. Hal ini menguatkan bahwa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tersebut akan berjalan efektif dan mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 46% anggaran dari APBD Kota Blitar dialokasikan ke sektor pendidikan dan itu tertinggi se-Indonesia. Sumber pembiayaan terbesar Program Pendidikan Gratis ini berasal dari APBD Kota. Dalam politik anggaran, Walikota Blitar telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik agar apa yang menjadi cita-citanya untuk mewujudkan rintisan wajib belajar 12 tahun dapat terwujud. Dari tahun ke tahun sektor anggaran bidang pendidikan mengalami peningkatan, hal ini seperti dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6
Anggaran Sektor Pendidikan Kota Blitar

Tahun	Anggaran Belanja	Belanja APBD Total	%
2011	174.038.171.511,00	550.548.740.079,97	31,61
2012	196.463.394.397,00	544.445.039.490,36	36,09
2013	245.442.659.625,00	602.250.599.403,35	40,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar

Faktor Penghambat

Payung Hukum Lemah

Isi kebijakan terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai kepada peraturan daerah, dan peraturan bupati maupun peraturan walikota. Sebenarnya jika diamati lebih dalam lagi peraturan memiliki tingkat sinkronisasi yang tinggi, dan saling melengkapi. Namun di dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun masih terjadi kurangnya sinkronisasi antara apa yang menjadi kebijakan

pemerintah Provinsi Jawa Timur dan apa yang menjadi kebijakan Walikota Blitar

Menurut Grindle, dalam kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan (*Power, interest, and strategi of actor involved*) oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut bisa mencakup partisipan tingkat pusat, provinsi, atau lokal baik itu kalangan birokrat, pengusaha, maupun masyarakat umum. Kekuasaan dan kepentingan merupakan konteks yang

menentukan arah implementasi kebijakan pendidikan, karena berbagai pihak memiliki kepentingan yang beragam serta *power* yang dapat mempengaruhi kebijakan. Akibatnya, mengenai siapa dan memperoleh apa akan ditentukan oleh strategi, sumber-sumber dan posisi kekuasaan setiap pihak yang terlibat baik dari perumus kebijakan, implementor kebijakan pendidikan maupun masyarakat Kota Blitar. Setelah munculnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi resmi diberlakukan. Namun muncul pro kontra terhadap kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut. Pihak kontra selama ini dianggap tidak mengalami kendala yang berarti dalam mengelola pendidikan. Bahkan banyak diantara kabupaten/kota di Indonesia yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Kota Blitar sebagai pihak yang kontra terhadap UU tersebut telah merasa keberatan jika pengelolaan pendidikan menengah diambil alih oleh Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar merasa dirugikan karena pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi menimbulkan anggapan bahwa kedekatan kebijakan yang berusaha diciptakan ke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali karena ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota. Pertimbangan lain adalah di mana yang paling dekat dengan masyarakat yaitu yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat, memudahkan partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Munculnya Peraturan tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Blitar untuk melaksanakan program pendidikan gratis. Dari perubahan UU No. 32 Tahun 2004 berubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 muncul adanya kebijakan ganda yang terjadi. Menurut Yamin (2013:118-119) disebabkan karena kebijakan pertama adalah berupa memperjuangkan pemerataan akses pendidikan supaya seluruh masyarakat mendapat pendidikan secara layak dan bermutu namun kemudian dihadang oleh kebijakan kedua yang menyulitkan implementasi pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan sosial. Namun itupun biasanya muncul sering dilatarbelakangi oleh tarik menarik kepentingan politik para elit lapisan atas untuk membuka ruang akses yang adil terhadap masyarakat.

Kurangnya Ketepatan Layanan

Terkaitan dengan ketepatan pendistribusian fasilitas yang sering diberikan tidak tepat waktu. Banyak guru, siswa, maupun wali murid yang mengeluhkan terlambatnya pendistribusian misalnya pemberian seragam. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh pencairan anggaran dan turunnya surat pertanggungjawaban yang mundur. Sehingga berimbas pada molornya pendistribusian bantuan. Faktor ketepatan layanan dapat menjadi penghambat bagi kelangsungan program pendidikan gratis, di mana fasilitas gratis tersebut diterima tepat pada saat siswa mulai masuk ke sekolah yaitu awal Juli namun pendistribusiannya seragam molor hingga bulan Agustus.

Belum Adanya SOP Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2012:106) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Yang mana struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasi prosedur yang akan memudahkan dan menyelaraskan tindakan dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah menjadi bidangnya. Standar operasional prosedur yaitu menyangkut sistem, prosedur, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan diantara pelaku pelaksana kebijakan. Standar operasional prosedur sebagai tanggapan internal pada waktu yang terbatas serta sumber-sumber dari pelaksana mempunyai keinginan dan keseragaman dalam bekerja.

Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun sejauh ini belum mempunyai ketetapan Standart Operasi Prosedur (SOP), selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Tim Manajemen UPTD dan Madrasah terhadap program rintisan wajib belajar 12 tahun dengan melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya intruksi-intruksi untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini menurut peneliti akan menjadi kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Sejauh ini pelaksanaan program masih berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar No. 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun. Sehingga menurut peneliti perlunya mengkaji pembuatan SOP. Diharapkan dengan adanya SOP tersebut kegiatan pada satuan kerja terhadap pelaksana program akan semakin jelas dan

pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tepat pada waktunya.

Kurangnya Peran Serta Orang Tua

Pendidikan memang bidang yang berdimensi besar, menyangkut kepentingan orang banyak, dan memiliki fungsi strategis. Pemerintah Kota Blitar telah berusaha sungguh-sungguh untuk mencerdaskan generasi bangsa dengan visi "APBD Pro Rakyat". Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kota Blitar mendapat dukungan dana yang sangat besar, sistem, prosedur, dan monitoring evaluasi telah diterapkan. Namun kesuksesan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah saja.

Pendidikan gratis justru membuat orang tua tidak peduli dan kurang bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya. Apalagi dengan pendidikan gratis saat ini malah orang tua sudah lepas dari tanggungjawab mereka untuk menyekolahkan anaknya, karena segala kebutuhan pendidikan sudah dicukupi oleh pemerintah. Kebanyakan dari orang tua sudah mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah. Sebenarnya pendidikan tidak cukup hanya dilakukan di sekolah saja, namun dirumah juga perlu belajar contohnya anak disarankan mengikuti les tambahan. Sebagian besar orang tua tidak memperhatikan hal tersebut karena mendapatkan pendidikan disekolah dirasa sudah cukup.

Maka dari itu, peran orang tua sangat menentukan sukses tidaknya program pendidikan. Orang tua selaku wali murid juga perlu memberikan motivasi dan dorongan kepada anak untuk lebih giat belajar. Selain itu orang tua harus

lebih sering memantau perkembangan prestasi anak tidak cukup hanya sekali pada saat pengambilan raport saja. Sehingga diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan Program Rintisan Wajib Belajar 12 tersebut.

Kurangnya Sosialisasi

Informasi merupakan unsur utama dari sebuah kebijakan mampu diimplementasikan dengan baik ataukah tidak. Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan rencana program pemerintah yang terkait langsung dengan seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dari program. Edward III (1980) menegaskan bahwa unsur utama dalam implementasi yang efektif adalah adanya komunikasi. Nasution (2004:106) menyebutkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik untuk menyampaikan gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar terkait pendidikan gratis pelaksanaannya sudah cukup baik yang mana sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara memasang baliho dan banner/spanduk yang banyak dijumpai di depan pagar sekolah-sekolah dan di pinggiran jalan Kota Blitar mengenai sosialisasi sekolah gratis. Selain itu sosialisasi dan berita mengenai pendidikan gratis juga disampaikan di sejumlah stasiun radio. Sehingga

diharapkan pendidikan tidak hanya dinikmati oleh warga tengah kota saja melainkan orang pinggiran kota juga diharapkan dapat menikmati sekolah gratis tersebut.

Namun peneliti menemukan bukti bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak sekolah yang mana pada saat pendistribusian fasilitas seperti buku dilakukan pada saat jam kosong dan tidak semua siswa berada di dalam kelas, sehingga banyak siswa yang tidak mengetahui bahwa ada pembagian fasilitas berupa buku misalnya menjadikan siswa tidak kebagian (tidak mendapatkan fasilitas tersebut). Dan juga sebagian besar orang tua salah penafsiran terhadap pengertian "Sekolah Gratis" di mana banyak wali murid yang beranggapan bahwa gratis tersebut ketiadaan pengeluaran biaya sama sekali untuk keperluan pendidikan anak. Namun perlu diketahui bahwa ada kebutuhan siswa yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar dalam hal pendanaan untuk kegiatan pendidikan belajar mengajar (PBM) yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar

Masyarakat Kota Blitar perlu menyikapi dengan cerdas makna sekolah gratis. Pemerintah Kota Blitar memang tidak memperkenankan sekolah menarik iuran secara paksa tetapi dengan adanya transparansi antara pihak sekolah dan wali murid terhadap pendanaan sekolah tentu dapat menjadi pertimbangan lain jika secara sukarela wali murid berpartisipasi untuk membantu pendanaan pendidikan. Perlunya melengkapi dan memperbaiki fasilitas sekolah seperti peralatan olahraga beserta lapangan, komputer, peralatan

ekstrakurikuler, pemeliharaan gedung, toilet, dan berbagai sarana prasarana lainnya. Karena keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga tidak mungkin sepenuhnya dibiayai dari dana BOS tersebut.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kurangnya informasi/sosialisasi dari pihak sekolah menyebabkan pembagian fasilitas ke siswa tidak merata. Selain itu kebijakan pendidikan gratis harus dijelaskan kepada wali murid secara gamblang agar tidak terjadi salah penafsiran karena ada pula kegiatan pendidikan yang pembiayaannya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Blitar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek/variabel diantaranya:
 - a. Adanya inisiasi yang diambil oleh Walikota Blitar untuk mengembangkan sumberdaya manusia melalui program rintisan wajib belajar 12 tahun.
 - b. Keberhasilan program tersebut didukung oleh sumberdaya anggaran yang memadai di mana APBD Kota Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga alokasi anggaran untuk bidang pendidikan juga ikut meningkat.
 - c. Dalam pelaksanaannya juga mendapatkan dukungan dari organisasi pelaksana yang terdiri dari Tim Pengarah (Walikota Blitar), Tim Manajemen Kota (Dinas Pendidikan), Tim Manajemen UPTD, serta Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta.
2. Hasil pelaksanaan program dapat dilihat dari penilaian indikator keluaran (*output*) program diantaranya:
 - a. Indikator akses: Untuk mendapatkan informasi atau pengaduan terkait Program Pendidikan Gratis pihak sekolah negeri dan swasta dapat berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar. Namun tidak sedikit pengaduan wali murid siswa langsung disampaikan kepada Walikota Blitar, sehingga pengaduan tersebut cepat ditindaklanjuti.
 - b. Indikator cakupan: Pendidikan gratis sudah menjangkau seluruh pelajar yang ada di Kota Blitar baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
 - c. Indikator ketepatan layanan: Faktor ketepatan layanan dirasa masih kurang karena fasilitas gratis diterima sering mengalami keterlambatan khususnya untuk sekolah swasta.
 - d. Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan: Pendidikan gratis ini dinilai bermanfaat bagi siswa kurang mampu dan tidak begitu berpengaruh bagi siswa mampu.
3. Dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun, diantaranya:
 - a. Faktor pendukung: adanya komitmen pejabat pelaksana yang lebih

memprioritaskan pendidikan di atas sektor yang lain. Hal tersebut nampak pada anggaran APBD Kota lebih diutamakan untuk sektor pendidikan.

- b. Faktor yang menjadi penghambat: lemahnya regulasi pengelolaan pendidikan yang ditunjukkan dengan tarik ulur pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah/kejuruan, kurangnya ketepatan layanan (*service delivery*) dalam pendistribusian fasilitas gratis, belum adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program yang mana sejauh ini masih berpedoman pada Peraturan Walikota, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi pendidikan anak, Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait program pendidikan gratis.

Saran

1. Pelaksanaan pendidikan gratis lebih bernuansa pada pemberian subsidi yaitu meringankan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar. Untuk mewujudkan program pendidikan gratis yang mana semboyan Walikota Blitar “pintar tak harus bayar” nampaknya pemerintah Kota Blitar perlu mengkaji ulang.
2. Perlunya peningkatan ketepatan layanan dalam hal pendistribusian fasilitas ke siswa agar tujuan pemerataan dan pemanfaatan program pendidikan dapat terwujud.
3. Perlunya peran serta masyarakat yakni wali murid untuk menunjang keberhasilan program tersebut.

4. Pihak sekolah diharapkan lebih jelas lagi dalam hal memberikan informasi kepada siswa dan wali murid agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap program pendidikan gratis.
5. Program pendidikan gratis di Kota Blitar melalui anggaran Pro-Rakyat terutama untuk warga kurang mampu mudah-mudahan dapat menginspirasi pemimpin di Kabupaten/Kota lain untuk melakukan program yang sama sehingga bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan menjadi bangsa yang cerdas, maju, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2015*. CV. Faesah Putra Abadi.
- Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Press, New Jersey: Pricenton University.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal, Fasli. *Reformasi Pendidikan: Dala Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyastuti, Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Budi Aksara.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Malang: Publishing.
- Yamin. 2013. *Ideologi dan Kebijakan Pendidikan: Menuju Pendidikan Berideologis dan Berkarakter*. Malang: Madani.
- Slamet, Yulius. Kemiskinan Petani Pedesaan: Analisis Megenai Sebab-Sebab dan Alternatif Pemecahannya. Seminar Nasional Laboratorium Sosiologi. Universitas Sebelas Maret.
<http://dokumen.tips/documents/kemiskinan-petani-pedesaan-copyan.html#>

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 251005